



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BONTANG



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2021

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



KATA PENGANTAR



Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014), sebagai instansi pemerintah perlu dilakukan penyusunan LAKIN Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

LAKIN KPKNL Bontang Tahun 2021 merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Bontang selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu pada tahun 2021. Penyusunan LAKIN ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Bontang sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bawah Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara, telah menerapkan sistem *Balance Score Card* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. Performa KPKNL Bontang dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kemenkeu *Three*, antara Kepala KPKNL Bontang dengan Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2021. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam LAKIN 2021 ini didasarkan pada hasil capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis *Balanced Score Card* (BSC). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bontang Tahun 2021 sebesar 113,19%, Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif yaitu *stakeholder perspective* (29,90%), *customer perspective* (16,73%), *internal process perspective* (33,10%), dan *learning and growth perspective* (33,45%).

Laporan kinerja ini disajikan untuk memberikan gambaran secara detail dan transparan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan di KPKNL Bontang dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan KPKNL Bontang. Penyusunan laporan ini juga diharapkan dapat

memberikan manfaat serta sebagai bahan evaluasi bagi KPKNL Bontang untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan akan terus diterapkan agar setiap tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan publik.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Bontang yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Atas seluruh usaha yang telah dilakukan setiap jajaran KPKNL Bontang dalam mewujudkan kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Bontang, 20 Januari 2022



Ditandatangani secara elektronik
Harist Syafiuddin



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Bontang Tahun Anggaran 2021 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). LAKIN ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

LAKIN mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bontang menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, LAKIN juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan KPKNL Bontang.

Sebagai salah satu instansi vertikal DJKN, KPKNL Bontang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan visi DJKN yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi DJKN yang juga menjadi misi KPKNL Bontang, yaitu: (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum, (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara, (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan, (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Bontang adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi para pengguna layanan.

Untuk mengukur kinerja KPKNL Bontang menerapkan sistem *Balanced Score Card* (BSC). BSC merupakan alat yang efektif untuk perencanaan strategis, alat untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar dan strategi organisasi ke dalam rencana tindakan (*action plans*) yang komprehensif, koheren, terukur dan

berimbang. Sebagai pengukuran kinerja, BSC mengukur penilaian berdasarkan IKU yang telah disusun dan ditetapkan untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peta sasaran strategis. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Bontang Tahun 2021, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Kepala KPKNL Bontang Tahun 2021, sebagai berikut:

Sasaran strategis pertama yaitu *Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal*, dengan implementasi IKU yaitu IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN mencapai 73,81% atau sebesar 119,04% dari target 62%. IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP) dengan capaian sebesar 124,05% dari target 100%. IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara dengan capaian sebesar 614% dari target sebesar 100%.

Sasaran strategis kedua adalah *Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa* diimplementasikan dalam IKU Indeks Ketepatan Waktu layanan kekayaan negara dan lelang dengan capaian sebesar 97,11 atau sebesar 105,56% dari target sebesar 92. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang dengan capaian sebesar 219,30% dari target 100%.

Sasaran strategis ketiga adalah *Birokrasi dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif dan Efisien* yang diimplementasikan dalam IKU Indeks kepuasan pengguna layanan yang merupakan gabungan dari indeks kepuasan pengguna layanan yang diberikan KPKNL Bontang, yaitu layanan pengelolaan kekayaan negara, layanan penilaian, layanan pengurusan piutang negara dan layanan lelang dengan capaian sebesar 4,87 atau sebesar 109,44% dari target sebesar 4,45.

Sasaran strategis keempat adalah *Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian Yang Efektif* diimplementasikan dalam IKU Persentase Bidang Tanah Yang Diserpiatkan dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 100% (10 bidang tanah). Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset) dengan capaian sebesar 100% dari target IKU 100% (27 NUP). IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian dengan capaian sebesar 0% atau 200 persen dari target 22%. IKU ini merupakan IKU dengan polarisasi data minimize dimana semakin rendah capaiannya dari target maka semakin baik.

Sasaran strategis kelima adalah *Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif* yang diimplementasikan dalam IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN dengan capaian sebesar 150 persen dari target sebesar 100%. IKU Persentase Produktivitas Lelang dengan capaian sebesar 38,89% atau sebesar 111,11% dari target sebesar 35%. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction atau E-Convensional Auction dengan cappaian sebesar 100% dari target 92%. IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN dengan capaian sebesar 0% atau sebesar 200% dari target 12,5%. IKU ini merupakan IKU dengan polarisasi data minimize dimana semakin rendah capaiannya dari target maka semakin baik.

Sasaran strategis keenam adalah *Edukasi Yang Efektif* diimplementasikan dalam IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dengan capaian 93,22 atau sebesar 102,43% dari target sebesar 91.

Sasaran strategis ketujuh adalah *Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif* yang diimplementasikan dalam IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara 100% atau sebesar 117,65% dari target sebesar 85%.

Sasaran strategis kedelapan adalah *SDM Yang Kompeten* yang diimplementasikan dalam IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan capaian sebesar 120% dari target sebesar 100%.

Sasaran strategis kesembilan adalah *Organisasi Yang Fits For Purpose* yang diimplementasikan dalam Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja dengan capaian 96,75 atau sebesar 129% dari target sebesar 75. IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dengan capaian sebesar 117,56% atau sebesar 94,05 dari target sebesar 80.

Sasaran strategis kesepuluh adalah *Pengelolaan Keuangan Yang Optimal* yang diimplementasikan dalam IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan nilai capaian sebesar 95,75% atau sebesar 91,44% dari target sebesar 95,5%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	7
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
PERAN STRATEGIS KPKNL BONTANG	10
SISTEMATIKA LAPORAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
RENCANA STRATEGIS	15
PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA	19
PETA STRATEGI KPKNL BONTANG	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
REALISASI ANGGARAN	48
BAB IV PENUTUP	50

BAB I PENDAHULUAN

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bontang merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Bontang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL Bontang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Bontang menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;

12. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
14. pelaksanaan administrasi KPKNL.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, struktur organisasi pada KPKNL Bontang terdiri dari:

1. Subbagian Umum. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. Seksi Pelayanan Penilaian. Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.
4. Seksi Piutang Negara. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.
5. Seksi Pelayanan Lelang. Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil PT. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian.
6. Seksi Hukum dan Informasi. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat,

jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

7. Seksi Kepatuhan Internal. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
8. Jabatan Fungsional. Terdapat dua jabatan fungsional di KPKNL Bontang, yaitu Pelelang dan Penilai Pemerintah. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Sedangkan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPKNL Bontang mempunyai 23 (dua puluh tiga) orang pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsinya, dengan komposisi berdasarkan tingkat golongan, jabatan, dan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan golongan per 31 Desember 2021

No.	Pegawai	II				III				IV				Jumlah
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	Eselon III									1				1
2.	Eselon IV							2	2					4
3.	Jabatan Fungsional					1	2	1						4
4.	Pelaksana	1	1	4		8								14
Jumlah		2	-	4	-	8	1	7	-	-	1	-	-	23

2. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan per 31 Desember 2021

No.	Pegawai	Pendidikan					Jumlah
		SLTA	D-I	D-III	D-IV/S1	S2	
1.	Eselon III				1	1	1
2.	Eselon IV				2	2	4

3.	Jabatan Fungsional				4		4
4.	Pelaksana		1	5	8		14
Jumlah		-	1	5	14	3	23

PERAN STRATEGIS KPKNL BONTANG

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Bontang memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Mengelola kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial

Sebagai salah satu instansi vertikal DJKN di daerah yang berperan dalam mengelola kekayaan Negara, KPKNL Bontang memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang berada di wilayah kerjanya. Pengelolaan kekayaan negara yang efektif dan efisien dapat memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan negara dapat berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Permasalahan utama yang dihadapi oleh KPKNL Bontang terhadap sasaran strategis ini adalah tidak adanya aset-aset negara yang memiliki nilai yang besar. Mayoritas aset-aset negara yang berada di wilayah kerja KPKNL Bontang memiliki nilai yang tidak signifikan, sehingga manfaat ekonomi berupa penerimaan negara yang dihasilkan dari aset tersebut juga tidak terlalu besar.

Selain itu, kewenangan KPKNL Bontang hanya pada pemanfaatan Barang Milik Negara yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga atau mitra swasta dikarenakan sebagian besar menggunakan mekanisme sewa dengan nilai yang kecil, sebagai contoh sewa kantin dan koperasi. Skema sewa ini belum tentu merupakan skema pemanfaatan aset yang paling optimal untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, padahal terdapat beberapa skema kerja sama dapat ditempuh seperti Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Pelayanan lelang dihadirkan sebagai salah satu sarana jual beli aset secara umum. Sebagian besar lelang yang dilakukan adalah lelang Hak Tanggungan, untuk melaksanakan suatu putusan atau penetapan pengadilan, melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang, seperti Barang Milik Negara, dan lain-lain. Tidak hanya terbatas pada eksekusi dan non-eksekusi wajib, KPKNL Bontang juga melayani permohonan lelang sukarela dan lelang dengan objek berupa hak menikmati barang. Pada Tahun 2021 KPKNL Bontang juga menyelenggarakan lelang dengan berkerja sama dengan Pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) di Kota Bontang.

Penggalian potensi lelang juga terus diupayakan kepada Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kementerian/Lembaga, dan *stakeholders* lainnya secara terus menerus dan berkesinambungan untuk dapat meningkatkan permohonan pelaksanaan lelang. Selain itu, KPKNL Bontang juga berusaha untuk lebih mengenalkan lelang kepada masyarakat umum dengan menggunakan media sosial sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari bea lelang.

Untuk mewujudkan pelayanan lelang yang lebih modern, saat ini KPKNL Bontang telah menggunakan aplikasi *e-Auction* untuk pelaksanaan lelang. Namun tidak hanya terbatas pada pelaksanaan lelang, tetapi KPKNL Bontang juga telah menggunakan modul permohonan *online* yang terdapat pada aplikasi *e-Auction* untuk menerima permohonan lelang.

Pengelolaan lelang yang semakin modern ini diharapkan dapat berpengaruh pada kenaikan tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Ketercapaian indikator ini dihitung dari jumlah pokok lelang. Tercapainya target pokok lelang dan bea lelang pada KPKNL Bontang tahun 2021 masih didominasi oleh kontribusi lelang pegadaian. Beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Bontang terkait lelang antara lain kondisi barang yang dilelang tidak *marketable*, wilayah kerja merupakan kawasan industri dimana lebih banyak pekerja pendatang yang tidak menetap sehingga kurang tertarik untuk membeli objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan serta kurangnya penyebaran informasi lelang.

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Penilaian merupakan salah satu *supporting system* dalam pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan barang milik negara lainnya yang digunakan oleh Kementerian / Lembaga Negara. Hasil penilaian barang milik negara tersebut antara lain akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara. Dengan demikian hasil penilaian diharapkan dapat turut membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

Tidak hanya terbatas untuk pengelolaan barang milik negara, Penilai Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel pada Pemerintah Daerah dan terciptanya *good governance* dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Terwujudnya pengurusan piutang Negara yang optimal.

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang diserahkan oleh Penyerah Piutang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara mendefinisikan Penyerah Piutang sebagai Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU) / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing*, yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara.

Subyek hukum Penyerah Piutang saat ini telah mengalami beberapa kali pengurangan. Dimulai sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN Perbankan tidak diserahkan lagi pengurusannya kepada PUPN/DJKN/KPKNL. Kemudian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 tanggal 21 September 2012 yang membatalkan frasa 'badan-badan negara' pada Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, maka piutang BUMN bukan lagi termasuk sebagai Piutang Negara. Pada tahun 2021, piutang yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan juga dinyatakan tidak lagi diurus oleh PUPN, hal ini dikarenakan telah habisnya masa berlaku dan tidak diperpanjangnya Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER/16/012015/Nomor PRJ-01/KN/2015 tanggal 29 Januari 2015.

Sepanjang tahun 2021 pengurusan Piutang Negara, khususnya yang dilakukan oleh KPKNL Bontang, dapat terlaksana secara optimal dikarenakan adanya penguatan pada aspek regulasi. Penguatan pada aspek regulasi ini ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana

Oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021.

Khusus terkait dengan program keringanan hutang, KPKNL Bontang berhasil menyelesaikan 1 (satu) BKPN yang selama ini pengurusannya mengalami kendala. Dengan demikian, program keringanan hutang ini turut menyumbang pada tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan oleh KPKNL Bontang. Pada sisi yang lain, program keringanan hutang ini juga turut membantu Penanggung Hutang yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya hutangnya.

Demi terwujudnya pengurusan piutang yang optimal, KPKNL Bontang juga berkolaborasi dengan Anggota PUPN Cabang Kalimantan Timur lainnya, dalam hal ini adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Pada tahun 2021, berkat kolaborasi ini, KPKNL Bontang mampu menyelesaikan piutang dengan total jumlah hutang mencapai lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Capaian ini membawa dampak positif terhadap kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus efektivitas penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada KPKNL Bontang.

Selanjutnya, baik di dalam maupun di luar tugas dan fungsi pengurusan piutang, KPKNL Bontang juga terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Penyerah Piutang maupun pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dalam capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dalam aspek Piutang Negara yang mampu mencapai nilai maksimal yaitu 5 (lima) dalam skala 5 (lima).

Selain terhadap Penyerah Piutang, KPKNL Bontang juga terus meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam mendukung terwujudnya pengurusan piutang yang optimal. Pada tahun 2021, KPKNL Bontang telah menjajaki adanya kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang. Pemilihan kedua instansi tersebut dilakukan guna mendukung pelaksanaan penelusuran keberadaan Penanggung Hutang maupun harta benda kekayaannya.

SISTEMATIKA LAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika pelaporan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai KPKNL Bontang, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, selama tahun 2021, KPKNL Bontang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Bontang Tahun 2021, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Bontang pada tahun berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra menjadi alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bontang merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. KPKNL Bontang sebagai instansi vertikal DJKN di daerah mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Kekayaan Negara adalah KPKNL Bontang sebagai lembaga/institusi vertikal DJKN di daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang di lingkup wilayah kerja Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.

Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara di wilayah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Bontang untuk periode 2020 s.d. 2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Bontang yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Bontang telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan Negara Yang Optimal
2. Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
3. Birokrasi dan Pelayanan Publik Yang *Agile*, Efektif dan Efisien
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian Yang Efektif
5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif
6. Edukasi Yang Efektif
7. Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif
8. SDM Yang Kompeten
9. Organisasi Yang *Fit For Purpose*
10. Pengelolaan Keuangan Negara Yang Optimal

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Bontang. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Bontang yang akan ditempuh adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan negara antara lain:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
- b. Penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel;
- c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif adalah:

- a. Implementasi dan sosialisasi regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN.
- b. Implementasi basis akrual dan Peningkatan kualitas penyajian Nilai BMN.
- c. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
- d. Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN.
- e. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang Kekayaan Negara pada satker-satker di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur dan penguatan edukasi di bidang pengelolaan kekayaan negara kepada *stakeholder*.
- f. Optimalisasi BMN melalui revaluasi kinerja BMN, penggunaan bersama oleh beberapa unit, serta sinergi pemanfaatan dengan BUMN dan/atau swasta.
- g. Mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan menggunakan indikator Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
- h. Percepatan sertifikasi BMN:
 - Peningkatan kualitas data yang tersaji dalam aplikasi SIMANTAP
 - Pembuatan Nota Kesepahaman antara Kanwil DJKN, Kanwil BPN dan satker-satker Kementerian/Lembaga terkait program sertifikasi BMN berupa tanah.
 - Pembentukan Tim Pokja Percepatan Sertifikasi BMN berupa tanah.
 - Peningkatan koordinasi antara Kanwil DJKN, Kanwil BPN, KPKNL, Kantor Pertanahan dan satker-satker Kementerian/Lembaga.

2. Pelayanan Lelang yang Modern dan Terpercaya

Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan lelang yang optimal
- b. Terwujudnya PNBP dari pelayanan lelang yang optimal

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah:

- a. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur, antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, maupun pihak swasta dan UMKM untuk lelang eksekusi maupun non eksekusi. Untuk mendukung strategi tersebut, akan dilakukan:

- Peningkatan kompetensi pegawai dalam penggalian potensi lelang dengan pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta pengguna jasa.
 - Pembuatan *database* pelaksanaan lelang dan pemeliharaan data yang berkelanjutan.
- b. Improvisasi dan inovasi sosialisasi lelang guna peningkatan pelayanan (modernisasi lelang melalui *e-auction*) dengan melakukan:
- Integrasi seluruh proses pelaksanaan lelang menggunakan *e-auction*, mulai dari permohonan hingga pelaksanaan lelang.
 - Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi *e-auction* kepada *stakeholder*.
 - Meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa lelang agar lebih berkualitas.
- c. Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang. Hal ini dilakukan dengan jalan:
- Pelaksanaan *Focus Grup Discussion* yang dilaksanakan rutin untuk memecahkan masalah-masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan lelang dan juga sebagai sarana *knowledge sharing* bagi Pelelang.
 - Pelaksanaan *Capacity Building* bagi Pelelang pada KPKNL Bontang dalam rangka penyamaan persepsi guna keseragaman dan tambahan pemahaman peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan, kemampuan teknis, keterampilan dan memiliki kepribadian dan sikap integritas tinggi, objektif, teliti, jujur, dan bertanggung jawab sehingga dalam memberikan pelayanan lebih profesional.
3. Peningkatan Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Efisien.
 Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien.
 Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut antara lain:
- a. Melakukan kegiatan *knowledge sharing*, diskusi berkala, *in house training* di bidang penilaian.
 - b. Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan kaji ulang laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.
 - c. Melakukan survei data harga dan sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran yang ada di seluruh wilayah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.
 - d. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Bontang yang *agile*, efektif, dan efisien
 Kondisi yang ingin dicapai untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik

KPKNL Bontang yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal.
- b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
- c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
- d. Komunikasi publik yang efektif.

Strategi-strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah:

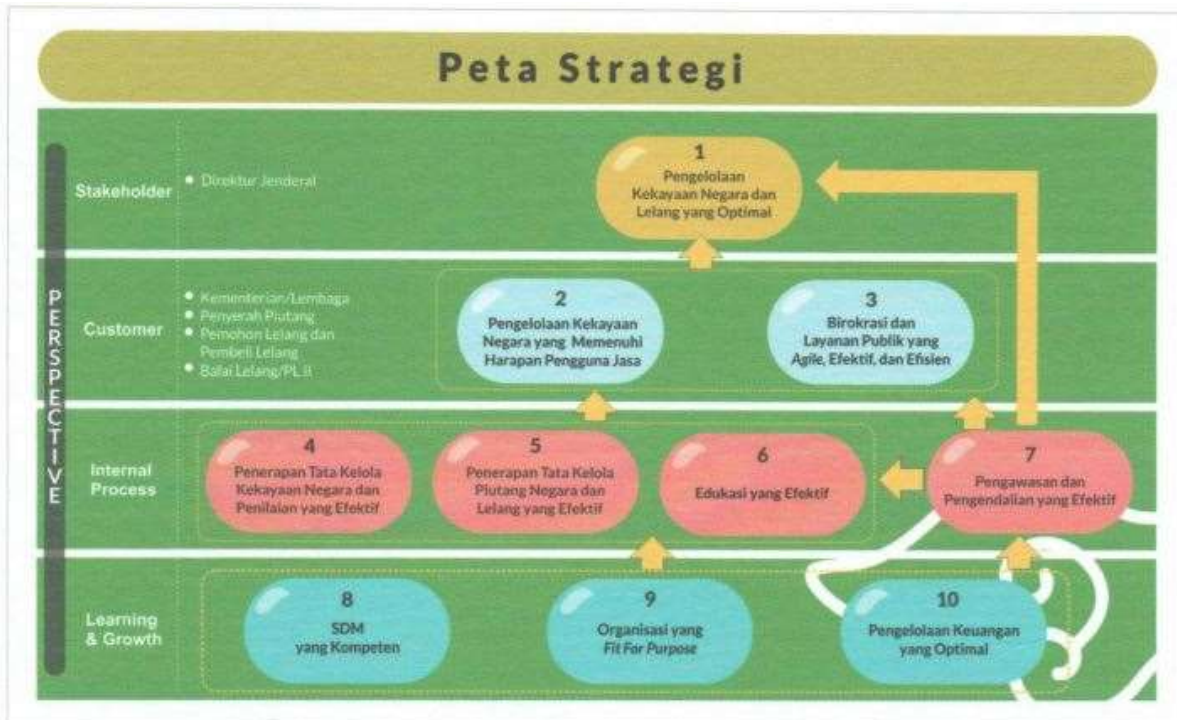
- a. Penerapan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisasi dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas unit organisasi.
- b. Penguatan budaya Kementerian Keuangan (*the new thinking of working*, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai) melalui budaya apel pagi.
- c. Implementasi Tata Kelola TIK yang andal sesuai *best practice*.
- d. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

1. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Bontang. Sasaran Strategis KPKNL Bontang Tahun 2021 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Bontang. Peta Strategi KPKNL Bontang 2021 memuat 10 Sasaran Strategis yaitu (1) Pengelolaan kekayaan Negara Yang Optimal, (2) Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, (3) Birokrasi dan Pelayanan Publik Yang *Agile*, Efektif dan Efisien (4) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian Yang Efektif, (5) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif, (6) Edukasi Yang Efektif, (7) Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif (8) SDM Yang Kompeten, (9) Organisasi Yang *Fit For Purpose*, (10) Pengelolaan Keuangan Negara Yang Optimal.

PETA STRATEGI KPKNL BONTANG



Peta Strategis DJKN mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari Peta Strategis KPKNL Bontang Tahun 2021 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Bontang mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis 1 Pengelolaan kekayaan Negara Yang Optimal		
Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Persen	62%
2. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Persen	100%
3. Persentase Penurunan outstanding piutang negara	Persen	100%

Sasaran Strategis 2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
Indikator Kinerja	Satuan	Target
4. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	Indeks	92
5. Persentase realisasi Pokok Lelang	Persen	100%
Sasaran Strategis 3 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien		
6. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	Indeks	4,45
Sasaran Strategis 4 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif		
7. Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	Persen	100%
8. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	Persen	100%
9. Deviasi ketergunaan hasil penilaian	Persen	22%
Sasaran Strategis 5 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif		
10. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	Persen	100%
11. Persentase produktivitas lelang	Persen	35%
12. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	Persen	92%
13. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	Persen	12,5%
Sasaran Strategis 6 Edukasi yang efektif		
14. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	91
Sasaran Strategis 7 Pengawasan dan pengendalian yang efektif		
15. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	Persen	85

Sasaran Strategis 8 SDM Yang Kompeten		
Indikator Kinerja	Satuan	Target
16. Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Persen	100
Sasaran Strategis 9 Organisasi yang <i>Fit-For-Purpose</i>		
17. Nilai review pengelolaan kinerja	Nilai	75
18. Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	Indeks	
Sasaran Strategis 9 Pengelolaan keuangan yang optimal		
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persen	95,5%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Bontang tahun 2020 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) IKU Kemenkeu *Three*. Pencapaian IKU tahun 2021 pada umumnya telah memenuhi target yang ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 113,19%, seperti disajikan pada tabel di bawah ini:

KPKNL BONTANG	1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%	Max / TLK
Realisasi	-	82,69%	82,69%	74,01%	74,01%	73,81%	73,81%	
Capaian		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	119,04%	119,04%	

KPKNL BONTANG	1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	1b-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	5,66%	28,58%	28,58%	59,07%	59,07%	124,05%	124,05%	
Capaian	56,59%	95,26%	95,26%	98,44%	98,44%	120%	120%	

KPKNL BONTANG	1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	1c-CP Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	0%	614%	614%	614%	614%	614%	614%	
Capaian	0%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL BONTANG	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	92	92		92		92	92	Max / Average
Realisasi	90	92		96,83		97,11	97,11	
Capaian						105,56%	105,56%	

KPKNL BONTANG	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	13,21%	62,21%	62,21%	124,96%	124,96%	219,30%	219,30%	
Capaian	66,05%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

KPKNL BONTANG	3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
	3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	4,45	4,45	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4.87	4.87	
Capaian	-	-	-	-	-	109,44%	109,44%	

KPKNL BONTANG	4. Penerapan Tata kelola kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif							
	4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

KPKNL BONTANG	4. Penerapan Tata kelola kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif							
	4b-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	22,22%	51,85%	51,85%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120%	115,23%	115,23%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL BONTANG	4. Penerapan Tata kelola kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif							
	4c-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	Min / TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL BONTANG	5. Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif							
	5a-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	0%	33,33%	33,33%	83,3%	83,3%	150%	150%	
Capaian	0%	66,67%	66,67%	111,11%	111,11%	120%	120%	

KPKNL BONTANG	5. Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif							
	5d-CP Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	Max / TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL BONTANG	6. Edukasi yang efektif							
	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-		91			91	91	Max / TLK
Realisasi			92,41			93,22	93,22	
Capaian			101,55%			102,43%	102,43%	

KPKNL BONTANG	9. Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
	9a-N Nilai reviu pengelolaan kinerja							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-					75	75	Max / TLK
Realisasi	-					96.75	96.75	
Capaian	-					129.00%	129.00%	

KPKNL BONTANG	9. Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
	9b-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max / TLK
Realisasi	91	94	94	94	94	94,05	94,05	
Capaian	113,13%	117,56%	117,56%	117,56%	117,56%	117,54%	117,56%	

KPKNL BONTANG	10. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
	10a-CP Presentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max / TLK
Realisasi	80,51%	86,98%	65,98%	92,30%	92,30%	91,44%	91,44%	
Capaian	84,30%	91,08%	91,08%	96,65%	96,65%	95,75%	95,75%	

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
PERIODE DESEMBER
TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							29.90%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							119.61%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	73.81%	19%	40%	119.044%	119.04%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	124.05%	14%	30%	124.050%	120.00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	614%	14%	30%	613.75%	120.00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16.73%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							113.65%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	92.00	97.11	11%	44%	105.56%	105.56%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	219.30%	14%	56%	219.30%	120.00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							109.44%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4.45	4.87	21%	100%	109.44%	109.44%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33.10%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							106.36%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100.00%	19%	43%	100.00%	100.00%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	100.00%	11%	25%	100.00%	100.00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0.00%	14%	32%	200.00%	120.00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114.95%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	150.00%	14%	25%	150.00%	120.00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35.00%	38.89%	14%	25%	111.11%	111.11%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventi	P/M	92.00%	100.00%	14%	25%	108.70%	108.70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	12.50%	0.00%	14%	25%	200.00%	120.00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							102.43%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	91	93.22	14%	100%	102.43%	102.43%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							117.65%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	100.00%	14%	100%	117.65%	117.65%	hijau
7b-CP	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang diitindaklanjuti	P/M							abu-abu
	Learning & Growth Perspective (30%)							33.45%	
8	SDM yang kompeten							120.00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							118.78%	
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M		0.00					abu-abu
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	96.75	14%	50%	129.00%	120.00%	hijau
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	94.05	14%	50%	117.56%	117.56%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							95.75%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95.5%	91.44%	14%	100%	95.75%	95.75%	kuning
10b-N	Persentase tindaklanjut temuan BA 15	P/M							abu-abu
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								113.19%	hijau

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (sembilan) IKU Kemenkeu *Three* Tahun 2021 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu *Three* Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal dengan IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN (SBSK), IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP), IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara.

IKU persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) meliputi Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021) Bobot 75% 20 NUP dengan capaian 74,01% dan Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2020 Bobot 25% 32 NUP dengan capaian 74,01%.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- a. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- b. pengurusan piutang negara; dan
- c. pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a. seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya. Utilisasi kekayaan negara adalah optimalisasi pendayagunaan kekayaan negara melalui pemanfaatan, penetapan status penggunaan, hibah, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah.
- b. pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan negara dapat berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dari target penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2021 sebesar Rp2.615.000,00, realisasinya adalah sebesar Rp3.243.911.043 (124,05%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PNBP Pengelolaan BMN dengan target sebesar Rp1.210.000.000,00 dengan

- capaian Rp1.324.881.256,00
- b. PNBPNiutang Negara dengan target sebesar Rp300.000.000,00 dengan capaian sebesar Rp73.003.029,00
 - c. PNBPNiutang Lelang dengan target sebesar Rp1.105.000.000,00 dengan capaian sebesar Rp3.243.911.043,00

Meskipun target PNBPNiutang yang berasal dari Pengelolaan BMN tercapai namun capaian tersebut didominasi oleh capaian PNBPNiutang yang berasal dari Penjualan Barang Rampasan. Sedangkan capaian PNBPNiutang yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN relative kecil karena tidak adanya aset-aset negara yang memiliki nilai yang besar. Mayoritas aset-aset negara yang berada di wilayah kerja KPKNL Bontang memiliki nilai yang kecil, sehingga manfaat ekonomi berupa penerimaan negara yang dihasilkan dari aset tersebut juga tidak terlalu besar.

Selain itu, kurang optimalnya pemanfaatan Barang Milik Negara yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga atau mitra swasta dikarenakan sebagian besar menggunakan skema sewa. Skema sewa ini belum tentu merupakan skema pemanfaatan aset yang paling optimal untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat, padahal terdapat beberapa skema kerja sama dapat ditempuh seperti Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pandemi Covid-19 juga menjadi kendala yang berarti terhadap realisasi penerimaan negara. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kegiatan perekonomian secara keseluruhan, dan menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Strategi yang akan dilakukan ke depan adalah penggalan potensi secara periodik terhadap *stakeholder* dan pengguna jasa.

Penetapan target PNBPNiutang dari Piutang Negara yang sebelumnya memperhitungkan kontribusi penyerahan BPJS Ketenagakerjaan Bontang sulit terealisasi karena saat ini PUPN sudah tidak berwenang mengurus piutang negara BPJS.

Realisasi PNBPNiutang Bea Lelang masih didominasi oleh bea lelang yang berasal dari lelang pegadaian.

2. Sasaran strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di lingkungan unit vertikal. Dari 14 (empat belas) jenis layanan kekayaan negara yang diukur indikatornya, realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 97,11 atau sebesar 105,56% dari target sebesar 92.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang dengan capaian sebesar 219,30% dari target sebesar 100%.

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL dalam hal ini Jabatan Fungsional Pelelang dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Realisasi pokok lelang untuk lelang yang dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Pelelang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp8.145.959.677,00 dari target sebesar Rp14.000.000.000,00. Sedangkan realisasi pokok lelang pegadaian tahun 2021 sebesar Rp75.187.772.800,00 dari target sebesar Rp38.000.000.000,00. Sehingga total realisasi pokok lelang adalah sebesar Rp83.333.732.477,00 atau sebesar 219,30% dari target total sebesar Rp38.000.000.000,00.

Permasalahan yang dihadapi adalah saat ini objek lelang Hak Tanggungan menjadi penyumbang utama permohonan lelang. Apabila dilihat dari sisi penyerahan banyak dan bernilai tinggi tapi tingkat laku masih sangat rendah.

Untuk waktu selanjutnya, Pelelang akan terlibat aktif melakukan penggalan potensi secara periodik terhadap para *stakeholder* dan pengguna jasa terutama untuk Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang biasanya memiliki nilai pokok lelang yang tergolong besar. Selain itu melalui Seksi Hukum dan Informasi, akan dilakukan pengenalan ke masyarakat luas mengenai *e-Auction*, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli barang melalui *e-Auction*.

3. Sasaran strategis Birokrasi dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif dan Efisien

Tingkat kepuasan pengguna layanan diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan yang dilakukan terhadap pengguna layanan KPKNL Bontang, yaitu layanan pengelolaan kekayaan negara, layanan penilaian, layanan pengurusan piutang negara, dan layanan lelang. Survei dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada pengguna layanan KPKNL Bontang. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra KPKNL Bontang di mata masyarakat, khususnya pengguna layanan KPKNL Bontang. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan KPKNL Bontang. Nilai ini ditinjau dari 10 (sepuluh) unsur yaitu kejelasan persyaratan administrasi, kejelasan prosedur, waktu penyelesaian layanan, kejelasan biaya layanan, hasil produk/jasa layanan, kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, kesopanan/keramahan petugas dalam memberikan pelayanan, kesesuaian penyelesaian layanan dengan janji layanan, mekanisme penanganan pengaduan, dan kenyamanan sarana dan prasarana.

Survei kepuasan pengguna layanan dilakukan satu kali yakni pada bulan November 2021. Sedangkan untuk survei kepuasan pengguna layanan lelang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan). Indeks rata-rata hasil survei kepuasan pengguna layanan KPKNL Bontang pada tahun 2021 adalah sebesar 4,87 dari target sebesar 4,45. Pelaksanaan IKU ini dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan bahwa terdapat kendala waktu penyampaian dan pengumpulan hasil survei yang singkat. Langkah yang diambil untuk mengendalikan kendala adalah dengan adanya kontrol berkala dari Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara kepada KPKNL Bontang dan dari KPKNL Bontang kepada satker, sehingga pelaksanaannya dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Namun demikian, KPKNL Bontang tetap berusaha untuk meningkatkan kembali pelayanan yang telah dilaksanakan kemudian memperbaiki sesuai saran yang ada.

4. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian Yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kekayaan negara, kegiatan tata kelola meliputi seluruh siklus pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara, dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Target IKU persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan pada Tahun 2021 adalah sebanyak 10 bidang tanah yang telah diselesaikan pada akhir Semester I Tahun 2021

Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Pada tahun 2021, KPKNL Bontang telah mengevaluasi sebanyak 27 Barang Milik Negara.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN yang digunakan dalam Persetujuan.

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian, maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Realisasi IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2021 adalah sebesar 0% dari target sebesar 22%. Perhitungan hasil penilaian oleh KPKNL Bontang memiliki nilai ketergunaan 100%, di mana basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian tersebut digunakan oleh pengelola barang untuk menetapkan persetujuan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN.

5. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Realisasi IKU persentase efektivitas penyelesaian BKPN berhasil tercapai 150%. Dari target 6 (enam) Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), sebanyak 9 (sembilan) BKPN telah berhasil diselesaikan selama tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp5.414.723.427,00.

Pengelolaan lelang yang optimal adalah pelaksanaan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL Bontang (Pejabat Lelang Kelas I/ Jabatan Fungsional Pelelang).

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa besar intensitas frekuensi lelang yang laku. Pada tahun 2021, dari 126 (seratus dua puluh enam) frekuensi pelaksanaan lelang, sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lelang dinyatakan laku, atau sebesar 38,89% dari target. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, yaitu sebesar 35%.

Seluruh lelang yang dilaksanakan pada tahun 2021 oleh KPKNL Bontang telah menggunakan *e-Auction* dengan capaian 108,70% dari target 92%. *E-Auction* adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Capaian PNBP Fungsional DJKN Tahun 2021 sebesar 0% dari target 12,5% atau dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat deviasi pada Data PNBP Fungsional DJKN.

6. Sasaran Strategis Edukasi yang Efektif dengan IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi.

tata kelola kekayaan negara yang efektif dengan IKU persentase bidang tanah BMN yang disertipatkan, persentase efektivitas penyelesaian BKPN, dan persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi.

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman *stakeholder* atas proses bisnis pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang.

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan tanggapan yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Dengan menggunakan indikator: 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan, kegiatan edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh KPKNL Bontang berada pada tingkat kepuasan "Sangat Memuaskan", dengan capaian nilai sebesar 93,22. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 91.

7. Sasaran strategis Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif yang diimplementasikan dengan IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur atau ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik negara meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilitasnya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Selama tahun 2021, KPKNL Bontang capaian 100% dari target 85% dengan menerbitkan 8 (delapan) persetujuan/penetapan pengelolaan BMN dan secara keseluruhan telah ditindaklanjuti. Dari jumlah tersebut, seluruh persetujuan/penetapan ditindaklanjuti oleh masing-masing satuan kerja.

8. Sasaran strategis SDM Yang Kompeten yang diimplementasikan dalam IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai yang mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada KPKNL Bontang Tahun 2021 sebesar 120% dari target sebesar 100% dengan jumlah bawahan yang telah memenuhi kriteria sebanyak 17 pegawai.
9. Sasaran Organisasi Yang *Fits For Purpose*.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang

Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Reviu Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja pada KPKNL Bontang Tahun 2021 sebesar 96,75 atau sebesar 129% dari target sebesar 75.

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan *feedback* peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

- 1) kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD).
- 2) *feedback* peserta yang terdiri dari *content, delivery, dan contribution*.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) Data pelaksanaan FGD yang ada di *e-performance* masing-masing Pejabat Administrator, dan
- 2) kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Aspek yang diukur dengan kuesioner (*feedback*) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. *Content* (topik materi dan pesan yang disampaikan);
2. *Delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
3. *Contribution* (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).

IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator Tahun 2021 tercapai sebesar 117,56% atau sebesar 94,05 dari target sebesar 80

10. Sasaran strategis kesepuluh adalah *Pengelolaan Keuangan Yang Optimal* yang diimplementasikan dalam IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan

anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar 99,56% dari target 95%. Rencana aksi yang akan dilakukan agar ke depan penyerapan anggaran menjadi lebih optimal adalah:

1. *Revolving* Uang Persediaan: mengoptimalkan uang persediaan untuk digunakan belanja barang dengan memperhatikan norma waktu penyampaian SPM GUP yaitu 30 hari kalender,
2. Kesalahan SPM: meningkatkan ketelitian penyusunan SPM serta koordinasi dengan KPPN,
3. Halaman III DIPA: melakukan revisi hal III sebelum melewati batas waktu yang ditentukan pada setiap triwulan,
4. Penyampaian Kontrak: meningkatkan koordinasi dengan pejabat terkait pengadaan yang menggunakan kontrak dengan memperhatikan norma waktu penyampaiannya yaitu 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani,
5. Capaian Output: meningkatkan koordinasi dengan seksi/subbag terkait dengan target Rincian Outputnya, agar penyampaiannya lebih akurat dan tepat waktu,
6. Realisasi Anggaran: meningkatkan koordinasi dengan bagian TURT untuk monitoring penggunaan anggaran agar sesuai dengan trajectory penyerapan per triwulannya.

REALISASI ANGGARAN

Untuk membiayai kegiatan dan pengadaan barang / jasa di KPKNL Bontang pada tahun 2021 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal sebesar Rp3.036.368.000,00. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp 3.023.174.103,00 atau sebesar 99,56% dengan rincian seperti terlihat dalam tabel berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang	Rp1.058.570.000,00	Rp1.052.983.603,00	99,47
2	Belanja Modal	Rp1.977.798.000,00	Rp1.970.190.500,00	99,61
Jumlah		Rp3.036.368.000,00	Rp3.023.174.103,00	99,56

Pada Tahun Anggaran 2021, KPKNL Bontang memiliki pagu anggaran belanja modal yang nilainya cukup signifikan, hal ini sejalan dengan proses pengadaan renovasi perbaikan struktur pondasi gedung kantor, sebelumnya proses perencanaan telah dilaksanakan pada periode TA 2020 namun karena adanya *refocusing* dan realokasi anggaran terkait penanganan pandemi COVID-19 anggaran belanja modal dialihkan ke TA 2021.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Bontang ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Bontang sebagai instansi vertikal DJKN di daerah serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020 s.d. 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2021 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan beberapa di antaranya memperoleh capaian di atas 100 persen.

Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan KPKNL Bontang dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, dengan cara:
 - a. Implementasi dan sosialisasi regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN.
 - b. Implementasi basis akrual dan Peningkatan kualitas penyajian Nilai BMN.
 - c. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
 - d. Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN.
 - e. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang Kekayaan Negara pada satker-satker di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur dan penguatan edukasi di bidang pengelolaan kekayaan negara kepada *stakeholder*.
 - f. Optimalisasi BMN melalui reviu kinerja BMN, penggunaan bersama oleh beberapa unit, serta sinergi pemanfaatan dengan BUMN dan/atau swasta.
 - g. Mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan menggunakan indikator Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
 - h. Percepatan sertifikasi BMN:
2. Pelayanan Lelang yang Modern dan Terpercaya, dengan cara:
 - a. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur, antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, maupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun non eksekusi.
 - b. Improvisasi dan inovasi sosialisasi lelang guna peningkatan pelayanan (modernisasi lelang melalui *e-auction*).
 - c. Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang.

3. Peningkatan Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Efisien, dengan cara:
 - a. Melakukan kegiatan *knowledge sharing*, diskusi berkala, *in house training* di bidang penilaian.
 - b. Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan kaji ulang laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.
 - c. Melakukan survei data harga dan sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran yang ada di seluruh wilayah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.
 - d. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.
4. Terwujudnya Pengurusan Piutang Negara yang optimal dan terwujudnya PNBPN dari pengurusan piutang negara yang optimal, dengan cara:
 - a. Melakukan *debtor tracing* dan *asset tracing*, dengan jalan berkoordinasi dengan instansi/stakeholder terkait untuk mencari/memeriksa debitur yang belum diketahui keberadaannya atau mencari aset/harta kekayaan lain yang dimiliki debitur;
 - b. Melakukan inventarisasi berkas piutang negara penyerahan dari Kementerian/Lembaga serta mengoptimalkan tingkat pengurusan piutang negara;
 - c. Melakukan penggalan potensi pengurusan piutang negara ke Pemerintah Daerah, RSUD, dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai.
5. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Bontang yang agile, efektif, dan efisien, dengan cara:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Bontang, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan secara eksternal, Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya KPKNL Bontang dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan secara profesional dan akuntabel.